

PENYIAPAN TENAGA KERJA PROFESIONAL DIBIDANG JASA KONSTRUKSI DAN PROPERTI PADA MASA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Muhammad Aris Ichwanto¹, Isnandar², dan Mohammad Mustofa An'syorie³

¹ Universitas Negeri Malang, muh.aris.ichwanto.ft@um.ac.id

² Universitas Negeri Malang, isnandar.ft@um.ac.id

³ Universitas Negeri Malang, musthofansyone.ft@um.ac.id

Abstrak: Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah resmi mulai diterapkan sejak tahun 2015. Hal ini membuat perpindahan atau pergerakan informasi, barang, pelajar, dan tenaga kerja profesional di wilayah negara-negara ASEAN semakin lebih luas. Pada hakekatnya Indonesia telah menyiapkan sistem pendidikan untuk siap dan berkompetisi dalam MEA dengan mempersiapkan SDM yang profesional. Namun masih terdapat kendala yang ditemui dalam membangun SDM berbasis kompetensi untuk berkompetisi dalam MEA. Untuk mencapai Mutual Recognition Arrangement (MRA) dibidang jasa konstruksi diperlukan sinergi stakeholder baik dari pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan asosiasi untuk melatih dan mempersiapkan setiap individu menjadi tenaga profesional yang dapat bersaing di era MEA.

Kata-kata kunci: MEA, Mutual Recognition Arrangement, Sinergi Kelembagaan

Abstract: The ASEAN Economic Community (AEC) has been officially implemented since 2015. This has made the movement of information, goods, students, and professional workers in the ASEAN countries increasingly wider. In essence, Indonesia has prepared an education system to be ready and compete in the MEA by preparing professional human resources. However, there are still obstacles encountered in building competency-based human resources for competition in the MEA. To achieve a Mutual Recognition Arrangement (MRA) in the field of construction services, a synergy of stakeholders from the government, industry, education, and associations is needed to train and prepare each individual to become a professional who can compete in the MEA era.

Keywords: MEA, Mutual Recognition Arrangement, Institutional Synergy

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai sejak tahun 2015 di seluruh negara-negara ASEAN. Hal ini membuat perpindahan atau pergerakan informasi, barang, pelajar, dan tenaga kerja profesional di wilayah negara-negara ASEAN semakin lebih luas (Paryono, 2010). Karena sistem pasar dan basis produksi tunggal, sangat kompetitif, dan terintegrasi dengan ekonomi global adalah karakteristik MEA (ASEAN, 2013). Dimana salah satu efek dari hal ini membuat orang dari negara yang miskin berpindah ke negara kaya, serta tenaga-tenaga profesional yang memiliki kompetensi tinggi akan dapat dengan mudah masuk ke negara-negara lain dan menguasai suatu lapangan pekerjaan atau sektor tertentu.

Pada hakekatnya Indonesia telah menyiapkan sistem pendidikan untuk membuat manusia yang profesional dan siap memasuki era MEA jauh sebelum MEA terwujud, yaitu dimulai dari tahun 2004 tentang SISDIKNAS yang mengatur tentang sistem pendidikan berbasis kompetensi; dan pada tahun 2006 seluruh pelatihan kerja di Indonesia harus mengacu pada aspek kompetensi. Kedua hal ini secara tersurat juga telah mengatur se-

cara rinci tentang sistem, lembaga, dan pedoman penyiapan tenaga professional di Indonesia.

Namun disayangkan tidak semua rencana yang telah disusun pemerintah berjalan dengan baik dalam mempersiapkan SDM professional berbasis kompetensi dalam memasuki era MEA ini, yakni: terbatasnya cakupan SKKNI, rendahnya Kualifikasi Okupasi Nasional, serta masih rendahnya pelatihan kerja dan pendidikan berbasis kompetensi. Sehingga Indonesia masih sangat terbatas dan cenderung tertatih dalam menghasilkan tenaga kerja profesional baik yang standar nasional dan internasional yang mampu bersaing dengan tenaga profesional dari negara ASEAN lainnya.

Untuk dapat menciptakan SDM atau tenaga profesional yang berkompeten dan berkualifikasi internasional di butuhkan pendidikan yang berkualitas dan efisien. Karena tanpa pendidikan yang berkualitas, akan sangat mustahil dapat menciptakan tenaga profesional yang berkompeten. Karena untuk dapat bertahan dan menjadi pemain yang kuat di era MEA, suatu negara perlu melakukan perubahan yang mendasar dan berkelanjutan didalam konektivitas pendidikan kejuruan atau pendidikan profesi dengan seluruh pelaku ekonomi (Bateman, 2012; Ralph et al, 2009). Dimulai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, dunia pendidikan sebagai tempat mempersiapkan tenaga profesional, serta dunia usaha sebagai pengguna tenaga profesional, sehingga nantinya seluruh tenaga profesional dapat memiliki standar dan kualifikasi yang sama.

Standar Nasional Tenaga Kerja Jasa Kontruksi di Indonesia

Data dari Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPERA), pada tahun 2015 diketahui bahwa dari total jumlah 7,2 juta tenaga kerja dibidang konstruksi di Indonesia hanya 5% yang telah memiliki sertifikasi atau berkisar antara 18 ribu tenaga kerja saja (BPSDM PUPERA, 2015). Kondisi ini jelas sangat bertolak belakang dengan peraturang UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang menyebutkan bahwa tenaga kerja di bidang konstruksi mulai dari perencana, pelaksana, hingga pengawas harus memiliki sertifikat keahlian kerja. Sertifikasi dilakukan selain sebagai pengakuan kompetensi diri, juga dapat dijadikan upaya untuk menjaga kualitas bangunan konstruksi sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu keuntungan lain dari sertifikasi adalah menjaga sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan tenaga asing di negeri sendiri (BPSDM PUPERA, 2015). Oleh sebab itu sertifikasi dan peningkatan kompetensi mutlak ditingkatkan, hal ini sebagai upaya agar tenaga kerja professional Indonesia mampu memperebutkan pekerjaan di negeri sendiri dan posisi yang strategis di negara-negara ASEAN. Karena tenaga kerja yang tersertifikasai mengindikasikan tenaga kerja tersebut professional, memiliki ketrampilan mumpuni, dan memiliki sikap kerja yang telah standar dunia kerja (SKKNI, 2010).

Di Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada dasarnya telah mengatur rumusan kerja yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan metode pelaksanaan konstruksi seorang tenaga konstruksi professional sesuai dengan tugas dan jabatan yang telah ditetapkan (SKKNI, 2010). Dimana kompetensi tenaga kerja Indonesia sudah diklasifikasikan bersumber pada guna kerjanya tiap- tiap. Klasifikasi tenaga kerja jasa konstruksi merupakan penggolongan profesi keahlian serta kemampuan kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi bagi disiplin keilmuan serta/ ataupun kefungsiian dalam perihal ini terdiri dari profesi perencanaan, penerapan, serta pengawasan pekerjaan konstruksi

Sertifikat keahlian untuk tenaga kerja konstruksi menurut PP No. 28/2000 dibedakan menjadi dua yaitu sertifikasi keterampilan (SKT) dan sertifikasi keahlian kerja (SKA). SKT diberikan kepada tenaga kerja terampil yang sudah memenuhi persyaratan bersumber pada disiplin keilmuan/ keahlian tertentu, sedangkan SKA diberikan kepada tenaga kerja pakar yang sudah memenuhi persyaratan bersumber pada disiplin keilmuan/ kefungisian/ kemampuan tertentu. Kedua sertifikat profesional tersebut diberikan melalui proses ujian secara komprehensif baik teori maupun praktek secara langsung yang disesuaikan dengan kualifikasi kerja konstruksi dibawah naungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK) (tabel 1).

Tabel 1. Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

No	Tenaga Kerja Konstruksi	Klasifikasi	Kualifikasi	Persyaratan Pendidikan (Minimal)	Persyaratan Pengalaman (Minimal)		
1	Tenaga Ahli	1. Arsitektur	1. Ahli Utama (VI)	Lulusan S1	S1: 5 th		
		2. Sipil		Lulusan D4	S1 Terapan: 4 th		
		3. Mekanikal	2. Ahli Madya (V)	Lulusan D3	D4: 6 th		
4. Elektrikal	S1: 2 th						
5. Tata Lingkungan	D4: 3 th						
2	Tenaga Terampil	6. Manajemen Pelaksanaan	3. Ahli Muda (IV)	Lulusan D3	D3: 5 th		
		1. Arsitektur			1. Tingkat I	Lulusan D1	S1: 1 th
		2. Sipil					2. Tingkat II
3. Mekanikal	Lulusan SMA	D3: 3 th					
4. Elektrikal		3. Tingkat III	Lulusan SD	SMK: 2 th			
5. Tata Lingkungan				Lulusan SD	SMA: 3 th		
6. Manajemen Pelaksanaan	SMP : 2 th						
						SD: 3th	

Sumber: Permen PU, 2013

Standar Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di Era MEA

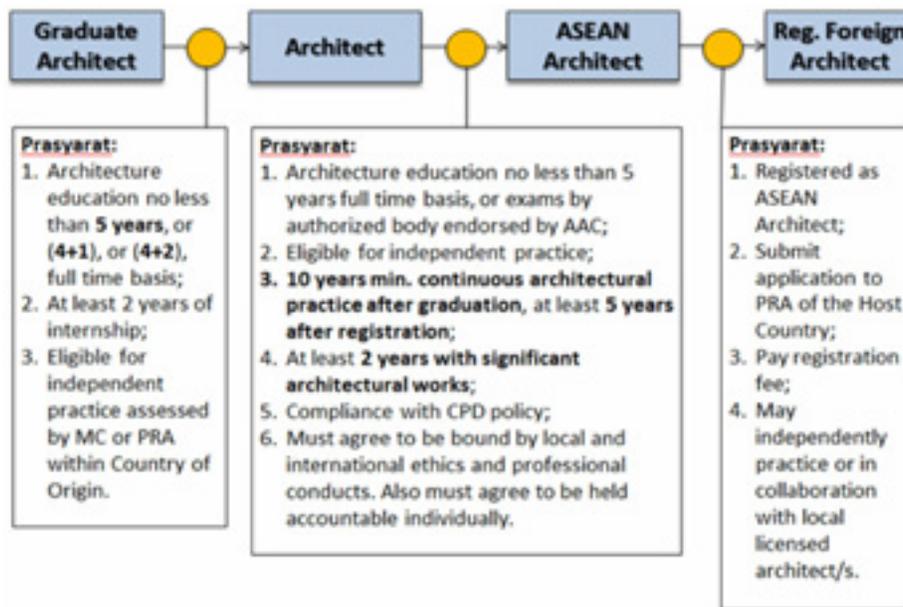
Melihat dari kacamata pelaksanaan MEA pada 2015, perihal yang butuh dicermati kalau salah satu manfaat diterapkan MEA merupakan terciptanya kenaikan derajat kompetensi dalam pergerakan arus benda serta jasa di negeri-negara ASEAN. Tetapi demikian, arus perpindahan tenaga kerja konstruksi disaat pelaksanaan MEA tidak bebas tanpa aturan yang berlaku, namun senantiasa diatur dalam sesuatu aturan yang disebut Mutual Recognition Arrangement (MRA). Dimana tujuan pembuatan MRA merupakan buat menghasilkan

prosedur serta mekanisme akreditasi buat menggapai kesamaan/ kesetaraan dan mengakui perbandingan antar negeri dalam perihal pembelajaran serta latihan, pengalaman, dan persyaratan lisensi untuk tiap profesi (Tullao dan Cortez, 2006; Rachaman, 2013; Ratnata, 2013).

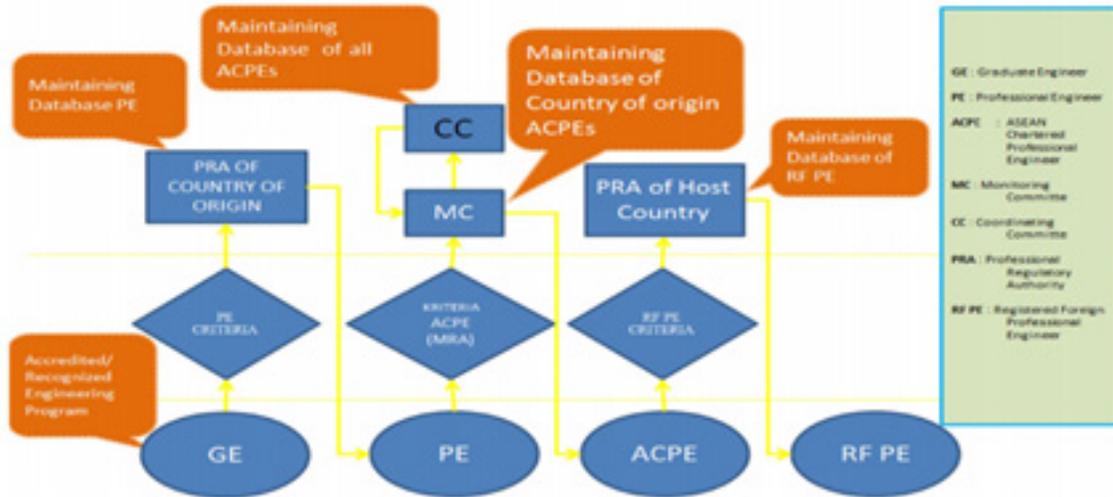
Di dalam aturan MRA, negeri yang menjadi tujuan seharusnya mengakui sertifikasi tenaga terampil dari negeri asal ataupun negeri pengirim. Selain itu sertifikasi ini sebagai proteksi dari masuknya tenaga asing yang tidak memenuhi kompetensi pekerjaannya, dan menciptakan kesadaran profesional tentang mutu dan standar kerja sesuai profesi masing-masing. Negara-negara ASEAN sepakat untuk menyamakan standar tenaga kerja di 8 bidang MRA, yaitu (a) Bidang Keteknikan; (b) bidang perawat; (c) Bidang Arsitek; (d) Bidang survei pemetaan; (e) Bidang Praktisi Medis; (f) Bidang Kedokteran gigi; (g) Bidang Akutansi; dan (h) Bidang pariwisata (ASEAN, 2015).

ASEAN pada tahun 2005 di Malaysia dan tahun 2007 di Singapura telah memiliki kesepakatan saling pengakuan untuk professional di bidang jasa konstruksi yang disebut dengan ASEAN MRA on Engineering Services dan Architectural Services yang mana kesepakatan ini disepakati oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. Dimana dalam MRA on Engineering Service dan MRA on Arcchitectural Service disepakati adanya persyaratan bagi seorang untuk mendapatkan ASEAN Chartered Professional Engineering (ACPE) atau sertifikat ahli konstruksi (konsultan) dan ASEAN Architech (AA) atau sertifikat keahlian di bidang arsitek.

Ada pula ketentuan penting guna memperoleh kedua sertifikat itu merupakan pengalaman kegiatan minimum 7 tahun di aspek arsitektur, dimana 2 dari 7 tahun itu ialah pengalaman teknis selaku perencana, eksekutif, ataupun pengawas. Tidak hanya itu, saat sebelum mencatat buat akta ACPE ataupun AA, tiap pakar arsitektur wajib terlebih dahulu mempunyai akta nasional ialah Akta Kemampuan(SKA). Sebaliknya yang berkuasa menghasilkan akta ACPE serta AA merupakan Coordinating Committee of Services(CCS) yang beranggotakan perwakilan pakar arsitektur dari 10 negeri badan ASEAN (ASEAN, 2015) (gambar 1 dan gambar 2).



Gambar 1. Alur untuk mendapatkan sertifikat ASEAN Architect (AA)



Gambar 2. Alur untuk mendapatkan sertifikat ASEAN Chartered professional Engineering (ACPE)

Hingga tahun 2015, dari seluruh negara-negara anggota ASEAN terdapat sebanyak 1.483 insinyur bersertifikat ASEAN dan arsitek bersertifikat ASEAN sebanyak 285 arsitek dengan rincian dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah sebaran tenaga ahli yang mempunyai sertifikat ACPE dan AA di negara ASEAN

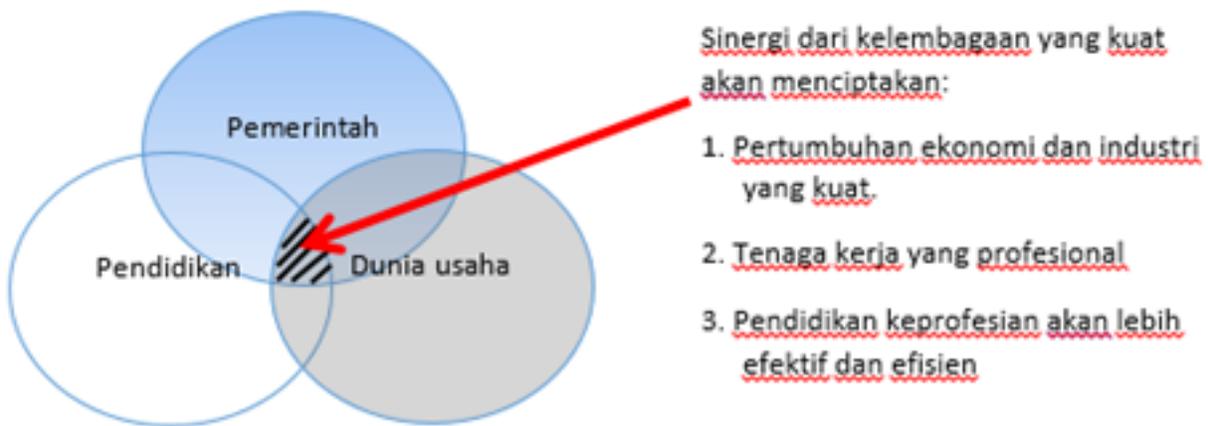
NO	Negara	ASEAN Chartered Professional Engineering (ACPE)	ASEAN Architect (AA)
1	Brunei Darussalam	2	1
2	Kamboja	0	0
3	Indonesia	569	84
4	Laos	3	6
5	Malaysia	228	35
6	Myanmar	133	12
7	Philipina	119	53
8	Singapura	230	74
9	Thailand	65	11
10	Timor Leste	0	0
11	Vietnam	134	9
Total		1.483	285

Sumber: ASEAN 2015

Penyiapan Tenaga Kerja Profesional Jasa Konstruksi Di Era MEA

Di dalam mengarungi MEA, tantangan besar Indonesia adalah untuk mencapai Mutual Recognition Arrangement (MRA) dibidang jasa konstruksi yang mana membutuhkan sinergi semua kelembagaan pengembangan SDM mulai dari tingkatan terendah sampai eksekutif pembelajaran, penataran kegiatan, sertifikasi kompetensi dan dunia industri. Dimana upaya kenaikan mutu

SDM dapat ditempuh dengan usaha sinergi 3 badan ialah antara pemerintah, dunia industri, serta akademisi buat memutuskan standar kompetensi profesionalisme di tiap- tiap zona (gambar 3). Usaha kenaikan mutu SDM guna bersaing dalam mengalami MEA wajib lekas dilaksanakan dalam bagan menggapai perkembangan. Bersamaan dengan peran serta stake holder yang amat berarti dalam penerapan pembangunan Indonesia, momentum berlakunya MEA wajib menjadi fokus nasional dalam pengimplementasian UU ketenaga kerjaan No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan pantas dipikirkan selaku payung hukum. Paradigma terkini kenaikan mutu daya kegiatan bertumpu pada 3 tiang penting, ialah standar kompetensi kegiatan, penataan pembibitan berplatform kompetensi dan sertifikasi kompetensi oleh badan yang independ.



Gambar 3. Sinergi kelembagaan pengembangan SDM di adopsi dari world bank (2012)

Sinergi dari ketiga lembaga pengembang SDM tersebut sangat penting sebagai syarat untuk melatih dan mempersiapkan setiap individu menjadi tenaga profesional yang dapat bersaing di era MEA. Dimana manfaat satu sama lain saling meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pelatihan, sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan akan memiliki kompetensi yang lengkap dan siap memasuki dunia kerja baik di dalam negeri maupun di lingkungan regional ASEAN. Selain itu manfaat lain yang didapat dari sinergi ketiga lembaga tersebut adalah kurikulum yang up to date dan relevan dengan dunia kerja, peralatan dan tempat praktek yang digunakan dalam proses pendidikan menunjang pengembangan kemampuan siswa, serta akan meningkatkan proses belajar mengajar.

Di dalam skema sinergi ini, dunia usaha diberikan ruang yang cukup luas oleh lembaga pendidikan dan pemerintah untuk lebih berpartisipasi dalam seluruh proses perencanaan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, penilaian, dan sertifikasi lulusan pendidikan jasa konstruksi. Adapun implementasi dari sinergi ketiga lembaga ini adalah melalui program-program berikut:

1. Program Magang

Pada program ini peserta magang harus menandatangani kontrak dengan tempat magang, dimana di dalam klausul kontrak tersebut terdapat jenis-jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dan dikuasai oleh peserta didik. Selain itu dunia usaha atau tempat magang memberikan pelatihan yang maksimal dan sesuai standar dunia usaha saat ini, sehingga diharapkan

siswa dapat dengan mudah masuk ke dunia usaha apabila telah selesai menyelesaikan pendidikan.

2. Program Pusat Inkubasi

Pada program inkubasi ini memungkinkan antara dunia pendidikan dan dunia usaha saling berbagi infrastruktur dan informasi pasar, dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi, kreasi, dan kemampuan tenaga profesional. Selain itu pusat inkubasi akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengakses teknologi terbaru dan mendapatkan pelatihan manajemen untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan menumbuhkan jiwa entrepreneurship.

3. Insetif Pajak

Mengingat bahwa tidak semua industri menyadari pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pendidikan profesi dan industri, maka pemerintah dapat memainkan perannya dalam menciptakan tenaga profesional yang baik. Yaitu dengan merumuskan undang-undang yang memungkinkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia (Atchoarena, 1999). Langkah kongkret dari program tersebut adalah dengan pemberian insetif pajak kepada industri yang mau berkolaborasi dengan dunia pendidikan dan berperan dalam proses sertifikasi tenaga ahli dan lulusan dari dunia pendidikan.

2. SIMPULAN

Dalam mengarungi MEA dan mencapai Mutual Recognition Arrangement (MRA) dibidang jasa konstruksi diperlukan sinergi seluruh kelembagaan pengembangan SDM yaitu antara pemerintah, dunia industri, dan dunia pendidikan untuk menetapkan standar kompetensi profesionalisme di tiap-tiap bidang keahlian. Dimana sinergi dari ketiga lembaga pengembang SDM tersebut sangat penting sebagai syarat untuk melatih dan mempersiapkan setiap individu menjadi tenaga profesional yang dapat bersaing di era MEA.

3. DAFTAR PUSTAKA

- Bateman, A., Keating, J., Gillis, S. & Dyson, C. (2012). Concept Paper: EAST ASIA SUMMIT Vocational Education and Training Quality Assurance Framework.
- DTVE-Directorate of Technical and Vocational Education. (2005). The roadmap of technical and vocational education in Indonesia. Jakarta
- Hiebert, B & William B, W. 2002. Technical and Vocational Education and Training in the 21st Century: New Roles and Challenges for Guidance and Counselling. UNESCO Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001310/131005e.pdf>
- Johan, Arif Bintoro. 2014. Peran Pendidikan Kejuruan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
- Mahdiansyah. 2007. Kajian Hubungan Dunia Pendidikan dengan Dunia Industri. Puslitjaknov. Retrieved from <http://sippendidikan.org/media.php?page=detailkarya&id=65>
- Meirina, Zita. 2014. Lulusan SMK 2015 Sudah bersertifikat. Retrieved from <http://www.antaranews.com/berita/460392/lulusan-smk-2015-sudah-bersertifikasi>
- Palerangi, Andi Muadz. 2015. Peran Pendidikan Kejuruan dalam Menghadapi Masyarakat Eko

- nomi ASEAN (MEA). Retrieved from <http://muadzmesinfunm.blogspot.co.id/2015/11/peran-pendidikan-kejuruan-dalam.html>
- Paryono. 2011. TVET initiatives in southeast Asian countries in response to increasing labour mobility within the region and beyond. *International Journal of Training Research*, Vol. 9
- , 2013. Mapping national and regional TVET initiatives in Southeast Asia and beyond to response to students and labour mobility. Retrieved from www.tvet-online.asia
- Rahman, M.Ali Sabililah. 2015. Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) [Competitiveness of Indonesian Workers Facing Asean Economic Community (AEC)]. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2015, 3 (1): 117-130
- Rachaman, Ichsan N. (2013). Persepsi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi minat siswa SMP Negeri kota Malang Terhadap SMK Bidang Keahlian Teknik Bangunan [Perception And Factors Affecting Public Junior High School Students In The City Of Malang To Continue Study At Senior Vocational High School In Specialization Of Building Techniques]. Universitas Negeri Malang : Malang. Retrieved from <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/Ts/article/view/25816> (7 July 2017)
- Ralph, E., Walker, K & Wimmer, R. (2009). Practicum Education Experience: Post Intern` View. *International Journal of Engineering Education*. Vol. 25, No.1 Januari 2009, pp.122-130
- Ratnata, I. W. (2013). Enhancing the Image and Attractiveness of TVET. In: *TVET@Asia*, issue1, 1-13,(Online). Retrieved from: http://www.tvet-asia/issue1/ratnata_tvvet1.pdf. (30 May 2013)
- World bank. 2012. Systems Approach for Better Education Results. Retrieved from http://sitereferences.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1290520949227/SABER-Teachers-Framework-Updated_June14.2012.pdf